

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya merupakan proses yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor ekonomi. Tingkat keberhasilannya dapat dilihat dari berbagai indikator, seperti pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, jumlah penduduk, kondisi wilayah, serta tingkat ketimpangan sosial dan ekonomi antar sektor. Tidak hanya berfokus pada peningkatan output ekonomi, pembangunan juga bertujuan untuk menekan bahkan menghapus kemiskinan, mengurangi kesenjangan pendapatan, serta menurunkan tingkat pengangguran (Kevin, Bhinadi, and Syari'udin 2022). Secara konseptual, pembangunan ekonomi dapat dipahami sebagai serangkaian kebijakan dan langkah strategis yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan memperluas kesempatan kerja, menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata, serta mendorong terciptanya keadilan ekonomi di tengah masyarakat (Wihastuti and , Latri Rahmatullah 2018).

Ketenagakerjaan merupakan salah satu isu sentral dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Sebagai bangsa yang tengah menuju status negara berpenghasilan menengah ke atas (*upper-middle income country*), Indonesia menghadapi tantangan struktural yang kompleks dalam mengintegrasikan seluruh angkatan kerjanya ke dalam pasar tenaga kerja yang produktif dan berkesinambungan (Gustina et al. 2026). Persoalan pengangguran bukan sekadar problem ekonomi, melainkan juga persoalan sosial yang berkaitan erat dengan kemiskinan, kesenjangan pendapatan, stabilitas sosial, dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh (Setiawan et al. 2024). Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT) menjadi salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif suatu perekonomian mampu menyerap angkatan kerja yang tersedia (Rambe and Prihanto 2019).

Dalam tataran global, pengangguran usia produktif menjadi perhatian serius berbagai organisasi internasional, termasuk *International Labour Organization* (ILO) dan *World Bank*. ILO mencatat bahwa fenomena pengangguran usia muda dan produktif di negara-negara berkembang kerap diperparah oleh berbagai faktor struktural, antara lain: ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri (*skills mismatch*), lemahnya perlindungan sosial bagi pekerja, dan lambatnya adaptasi kebijakan ketenagakerjaan terhadap perubahan teknologi dan globalisasi. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang terbesar di dunia, tidak luput dari permasalahan tersebut (Usman, Hatu, and Blongkod 2025).

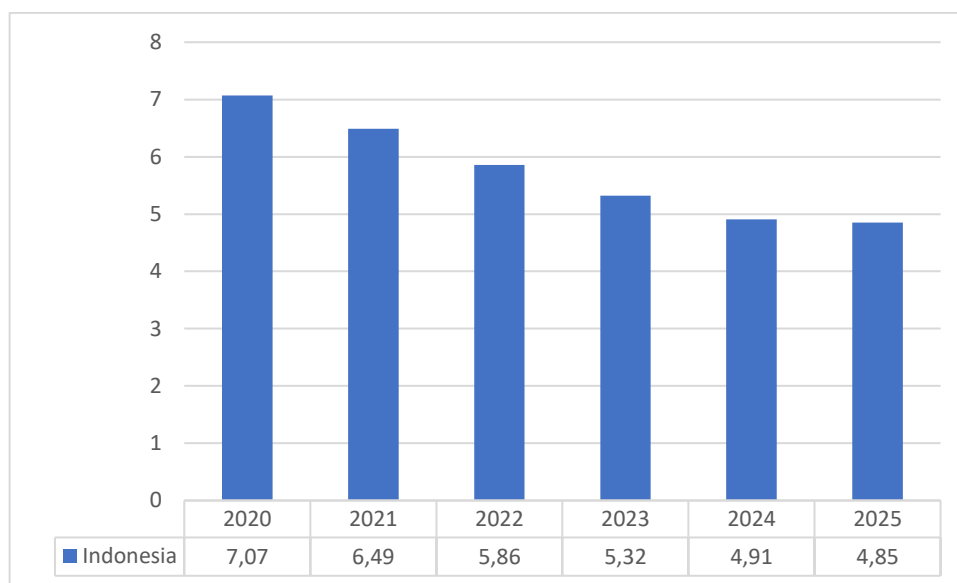
Pembangunan ekonomi pada hakikatnya merupakan proses multidimensional yang tidak hanya berfokus pada peningkatan output nasional, tetapi juga pada perbaikan struktur ketenagakerjaan dan pengurangan tingkat pengangguran (Silitonga, Manalu, and Silalahi 2026). Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi sering kali dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan, namun angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta-merta berbanding lurus dengan penurunan tingkat pengangguran. Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja bersifat non-linear dan sangat bergantung pada struktur ekonomi, kualitas pertumbuhan, serta kapasitas institusional yang dimiliki suatu wilayah (Asni and Masyadi 2025).

Dalam konteks Indonesia, tantangan makroekonomi menjadi sangat kompleks dalam kurun waktu 2020–2025. Periode ini ditandai oleh guncangan

pandemi COVID-19 yang memicu resesi ekonomi terburuk dalam dua dekade terakhir. Pada tahun 2020, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,07%, pertama kalinya sejak krisis moneter 1997–1998 (Sasmiharti and Karyati 2024). Pandemi ini tidak hanya melumpuhkan aktivitas ekonomi, tetapi juga memukul pasar tenaga kerja secara masif. Jutaan pekerja kehilangan pekerjaan, baik melalui pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun pengurangan jam kerja yang drastis. BPS mencatat bahwa pada Agustus 2020, TPT nasional melonjak menjadi 7,07%, meningkat signifikan dibandingkan 5,23% pada periode yang sama tahun 2019.

Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia Tahun 2020-2025

(Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Berdasarkan gambar 1.1 data tingkat pengangguran terbuka di Indonesia periode 2020–2025, terlihat adanya tren penurunan yang cukup konsisten dari 7,07% pada tahun 2020 menjadi 4,85% pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya proses pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang berdampak pada meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Namun demikian,

tingkat pengangguran yang masih berada di atas 4% menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja belum sepenuhnya optimal dalam menyerap angkatan kerja (Endang et al., 2023). Fenomena ini dikenal dalam literatur ekonomi sebagai *jobless growth*, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak mampu menciptakan lapangan kerja secara proporsional (Sumanti et al. 2026).

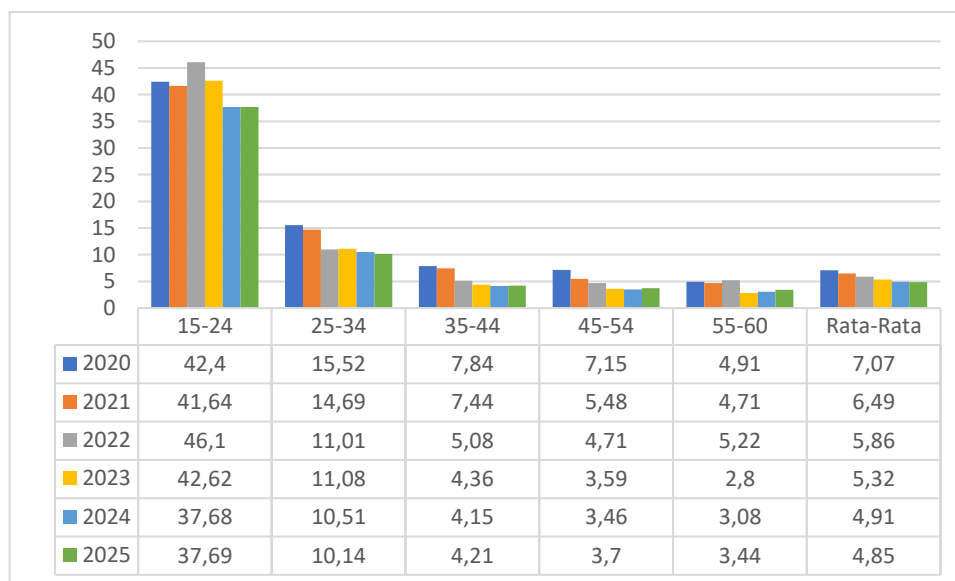
Kelompok usia 25–34 tahun memegang peranan strategis dan kritis sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Berbeda dengan kelompok usia 15–24 tahun yang umumnya masih dalam masa transisi dari pendidikan menuju dunia kerja, individu pada rentang usia 25–34 tahun merupakan angkatan kerja yang secara teori telah memiliki kombinasi antara pengalaman kerja awal, tingkat pendidikan yang lebih matang, dan kapasitas produktivitas yang optimal. Kelompok ini seharusnya berada pada fase *peak productivity* dalam perjalanan karir mereka. Di sisi lain, mereka juga merupakan generasi yang menanggung tanggung jawab rumah tangga yang semakin besar, sehingga status pengangguran pada usia ini memiliki konsekuensi sosio-ekonomi yang jauh lebih serius dibandingkan pengangguran usia muda (Sari and Handayani 2022).

Lebih jauh, kelompok usia 25–34 tahun merupakan generasi yang akan menjadi pilar utama dalam memanfaatkan momentum bonus demografi Indonesia. Bonus demografi, yaitu kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan penduduk non-produktif, diperkirakan akan mencapai puncaknya antara tahun 2020 hingga 2030. Apabila angkatan kerja usia 25–34 tahun tidak terserap dengan baik oleh pasar tenaga kerja, maka Indonesia tidak hanya gagal memanfaatkan *window of opportunity* bonus demografi, tetapi juga berisiko menghadapi bencana demografi berupa ledakan pengangguran massal di segmen usia paling produktif. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap

faktor-faktor yang memengaruhi TPT usia 25–34 tahun memiliki implikasi kebijakan yang sangat fundamental bagi masa depan perekonomian Indonesia (Sari and Handayani 2022).

Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Umur

Di Indonesia Tahun 2020-2025 (Persen)



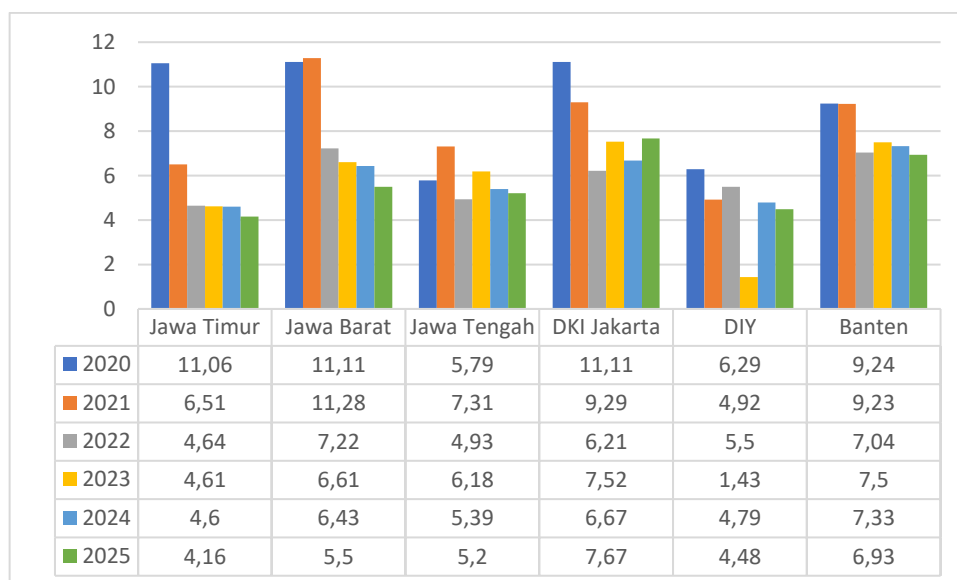
Sumber Badan Pusat Statistik 2020-2025 (data sekunder diolah)

Berdasarkan gambar 1.2 Kelompok usia 15-24 ini memiliki tingkat pengangguran tertinggi selama 2020–2025, yaitu 42,4% (2020), 41,64% (2021), 46,1% (2022), 42,62% (2023), 37,68% (2024) dan 37,69 (2025) . Tingginya TPT disebabkan oleh fase transisi dari pendidikan ke dunia kerja, kurangnya pengalaman kerja, serta ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri. Tingkat Pengangguran Terbuka usia 25–34 tahun di Provinsi Jawa Timur mengalami tren penurunan selama periode penelitian. 15,52% (2020) menjadi 10,14% (2025). Penurunan ini menunjukkan bahwa pada usia produktif awal sebagian besar tenaga kerja sudah mulai stabil dalam pasar kerja karena telah memiliki pendidikan dan pengalaman kerja awal. Kelompok usia 35–44 tahun

menunjukkan tren penurunan tingkat pengangguran dari 7,84% pada tahun 2020 menjadi 4,21% pada tahun 2025.. Hal ini disebabkan oleh pengalaman kerja yang lebih matang dan posisi pekerjaan yang lebih stabil. Usia 45-54 mengalami penurunan TPT dari 7,15% (2020) menjadi 3,7% (2025). Pada usia ini tenaga kerja umumnya sudah memiliki karier yang mapan sehingga risiko pengangguran lebih kecil. Kelompok usia 55–60 tahun memiliki tingkat pengangguran yang relatif rendah, yaitu sekitar 4,91% (2020) hingga 3,44% (2025). Rendahnya pengangguran terjadi karena sebagian besar sudah memiliki pekerjaan tetap atau keluar dari angkatan kerja menjelang masa pensiun. Semakin muda kelompok usia, semakin tinggi tingkat penganggurannya. Sebaliknya, semakin bertambah usia dan pengalaman kerja, tingkat pengangguran cenderung menurun.

Gambar 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan umur 25-34

Di Pulau Jawa Tahun 2020-2025 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik 2020-2025 (data sekunder diolah)

Berdasarkan gambar 1.3 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) usia 25–34 tahun di enam provinsi Pulau Jawa selama periode 2020–2025 memperlihatkan pola yang beragam. Provinsi Jawa Timur mencatat penurunan

TPT yang cukup konsisten, yaitu dari 11,06% pada tahun 2020 menjadi 4,16% pada tahun 2025. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kemampuan pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja usia produktif. Berbeda dengan Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat pengangguran yang relatif paling tinggi pada awal periode penelitian, dengan TPT sebesar 11,11% pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 11,28% pada tahun 2021. Meskipun demikian, angka tersebut kemudian menunjukkan kecenderungan menurun secara bertahap hingga mencapai 5,50% pada tahun 2025. Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan yang tidak stabil, ditandai dengan kenaikan tingkat pengangguran pada tahun 2021, penurunan pada tahun 2022, serta kembali mengalami fluktuasi pada tahun-tahun berikutnya hingga berada pada tingkat 5,20% pada tahun 2025.

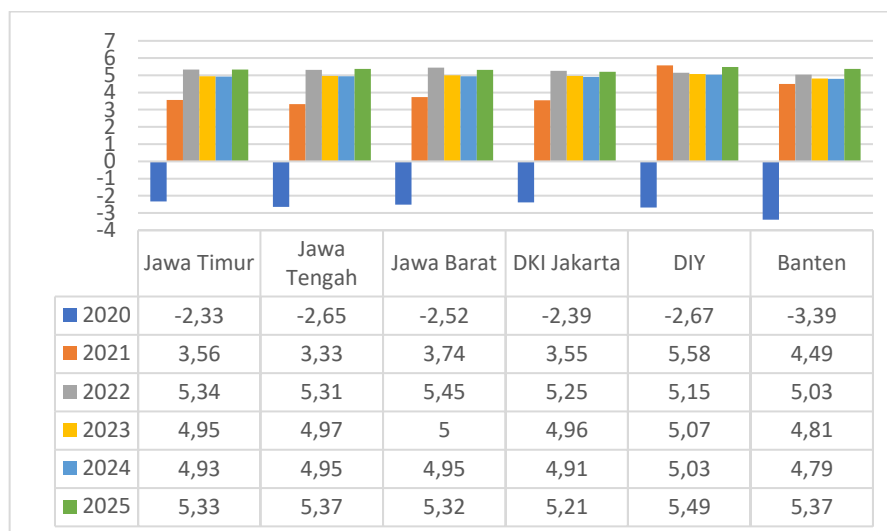
Kondisi yang hampir serupa juga terlihat di DKI Jakarta, di mana tingkat pengangguran usia 25–34 tahun cenderung lebih rendah dibandingkan awal periode penelitian, namun masih mengalami perubahan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan provinsi dengan tingkat pengangguran yang relatif lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa, meskipun pada periode pengamatan masih terjadi perubahan yang cukup signifikan, terutama penurunan tajam pada tahun 2023 sebelum kembali meningkat pada tahun berikutnya. Adapun Provinsi Banten menunjukkan kecenderungan penurunan TPT secara bertahap, dari 9,24% pada tahun 2020 menjadi 6,93% pada tahun 2025, walaupun sempat mengalami peningkatan pada tahun 2023.

Secara umum, perkembangan TPT usia 25–34 tahun di Pulau Jawa selama periode penelitian menunjukkan kecenderungan menurun, namun dengan pola

perubahan yang berbeda pada setiap provinsi. Variasi tersebut mengindikasikan bahwa kondisi pasar tenaga kerja di masing-masing daerah memiliki karakteristik yang tidak sama, sehingga penyerapan tenaga kerja usia produktif diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi yang berbeda. Fenomena ini menjadi dasar penting untuk mengkaji lebih lanjut pengaruh pertumbuhan ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka usia 25–34 tahun di Pulau Jawa selama periode 2020–2025.

Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel makroekonomi pertama yang diduga memiliki pengaruh signifikan terhadap TPT usia 25–34 tahun. Hubungan ini secara teoritis dijelaskan melalui Hukum Okun (Okun's Law) yang dikemukakan oleh *Arthur Okun* pada tahun 1962 (Harahap et al. 2026). Okun berargumen bahwa terdapat hubungan negatif dan empiris antara pertumbuhan PDB riil dengan tingkat pengangguran: setiap kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi di atas potensinya akan diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran sekitar 0,5%. Namun, validitas Hukum Okun dalam konteks di Pulau Jawa periode 2020–2025 perlu diuji secara empiris, mengingat fenomena *jobless growth* yang diamati menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi yang solid tidak serta-merta mendorong penurunan TPT secara signifikan pada kelompok usia 25–34 tahun. Hal ini dapat terjadi akibat perubahan struktur ekonomi yang semakin *capital-intensive*, masifnya digitalisasi, serta ketidaksesuaian keterampilan angkatan kerja dengan kebutuhan industri yang terus berevolusi (Widia and Samsuddin 2025).

Gambar 1.4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Di Pulau Jawa Tahun 2020-2025 berdasarkan ADHK (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik 2020 - 2025

Berdasarkan Gambar 1.4 laju PDRB di enam provinsi Pulau Jawa, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Banten, dalam rentang waktu 2020 hingga 2025 yang secara keseluruhan menunjukkan kecenderungan meningkat secara berkelanjutan. Pada awal periode, yaitu tahun 2020 seluruh provinsi di Pulau Jawa mengalami pertumbuhan ekonomi yang bernilai negatif. Penurunan paling dalam terjadi di Banten sebesar -3,39%, sedangkan DKI Jakarta mencatat kontraksi paling ringan yaitu -2,39%. Kondisi ini mencerminkan tekanan besar terhadap aktivitas ekonomi akibat gangguan global pada periode tersebut. Memasuki tahun 2021, kinerja ekonomi mulai menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan yang kembali positif, meskipun masih terbatas. DI Yogyakarta mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 5,58%, menandakan pemulihan yang relatif cepat. Sementara itu, Jawa Tengah (3,33%) dan Jawa Timur (3,56%) mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya. Pada tahun 2022, terjadi akselerasi pertumbuhan di seluruh provinsi.

Jawa Barat mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 5,45%, diikuti Jawa Timur sebesar 5,34%. Secara umum, seluruh wilayah berada pada kisaran pertumbuhan sekitar 5%, yang menunjukkan pemulihan ekonomi yang semakin merata. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 cenderung lebih stabil. Jawa Barat kembali menjadi provinsi dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 5%, sementara provinsi lainnya berada pada rentang 4,8% hingga 5%. Hal ini mengindikasikan kondisi ekonomi yang mulai terkendali. Pada tahun 2024, laju pertumbuhan terlihat relatif stagnan atau sedikit mengalami penurunan. Sebagian besar provinsi mencatat pertumbuhan di kisaran 4,7% hingga 5,0%.

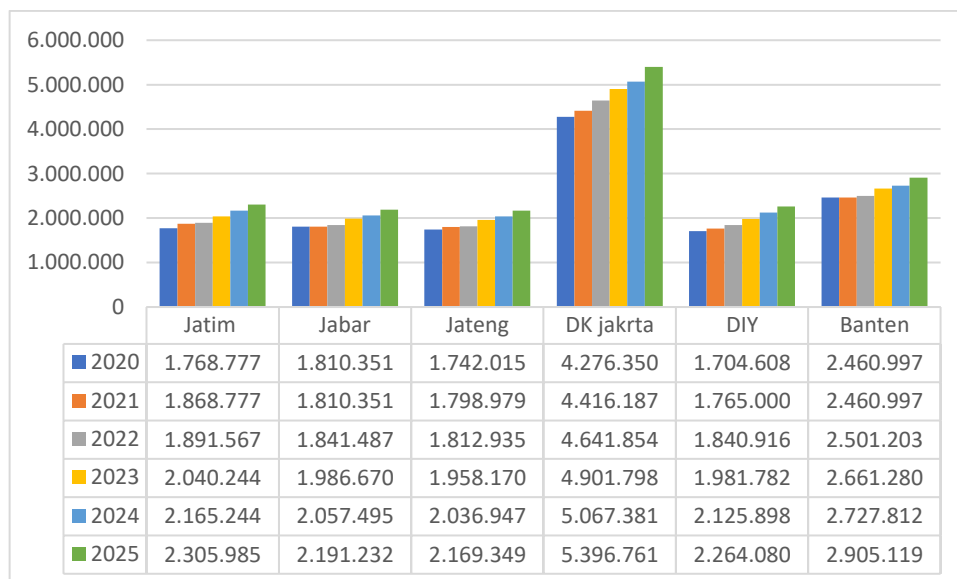
Fenomena ini mencerminkan tahap normalisasi setelah periode pemulihan yang cukup cepat sebelumnya. Memasuki tahun 2025, pertumbuhan ekonomi kembali menunjukkan peningkatan di seluruh provinsi. Jawa Tengah dan Banten menjadi wilayah dengan pertumbuhan tertinggi, masing-masing sebesar 5,37%. Secara keseluruhan, semua provinsi kembali mencatat pertumbuhan di atas 5%, Pertumbuhan tersebut berpotensi menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) usia 25–34 tahun melalui peningkatan aktivitas produksi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, PDRB menjadi salah satu indikator penting dalam menjelaskan dinamika pengangguran pada kelompok usia produktif di Indonesia yang menunjukkan penguatan ekonomi yang semakin merata di kawasan Pulau Jawa.

Bagi perusahaan, kenaikan upah minimum berarti meningkatnya biaya produksi. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi, salah satunya dengan mengurangi jumlah tenaga kerja. Dampaknya, peluang kerja menjadi lebih terbatas dan tingkat pengangguran berpotensi meningkat (Dharmala 2016). Fenomena ini juga berkaitan dengan konsep kekakuan upah (*wage rigidity*),

di mana kenaikan tingkat upah menyebabkan peningkatan penawaran tenaga kerja, namun di sisi lain menurunkan permintaan tenaga kerja, sehingga memunculkan kelebihan tenaga kerja atau pengangguran. Kekakuan upah tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan upah minimum, keberadaan serikat pekerja, serta praktik efisiensi upah (Tangke 2023).

Perkembangan upah minimum di tiap Provinsi menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menetapkan adanya penyesuaian upah minimum secara berkala. Tujuannya adalah agar pekerja memperoleh penghasilan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak, baik untuk dirinya maupun keluarganya.

Gambar 1.5 Upah Minimum Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2020-2025 (Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik (2020 – 2025)

Berdasarkan gambar 1.5 Dinamika Upah Minimum Provinsi (UMP) di enam wilayah di Pulau Jawa Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Banten dalam rentang waktu 2020 hingga 2025 yang secara umum menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan

tersebut mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan pengupahan yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta standar kebutuhan hidup layak bagi pekerja. Pada awal periode, yaitu tahun 2020, besaran UMP di masing-masing provinsi masih berada pada tingkat awal sebelum mengalami penyesuaian bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Sepanjang periode pengamatan, seluruh provinsi mengalami peningkatan yang relatif konsisten, meskipun besarnya kenaikan berbeda-beda sesuai dengan karakteristik ekonomi masing-masing daerah.

Dalam hal ini, DKI Jakarta menempati posisi tertinggi dengan nilai UMP yang meningkat dari sekitar 4,27 juta menjadi lebih dari 5,39 juta, yang mencerminkan tingginya biaya hidup serta dominasi sektor jasa dan aktivitas ekonomi modern di wilayah tersebut. Banten menyusul sebagai provinsi dengan tingkat UMP yang cukup tinggi, mengalami kenaikan dari sekitar 2,46 juta menjadi 2,90 juta, didorong oleh perannya sebagai kawasan industri sekaligus wilayah penyangga ibu kota. Sementara itu, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah berada pada kelompok menengah dengan tren kenaikan yang stabil, mencerminkan pertumbuhan ekonomi regional serta upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha. Di sisi lain, DI Yogyakarta tetap menjadi provinsi dengan tingkat UMP paling rendah, meskipun tetap menunjukkan peningkatan dari sekitar 1,70 juta menjadi 2,26 juta, yang umumnya dipengaruhi oleh struktur ekonominya yang lebih didominasi sektor pendidikan, pariwisata, dan usaha skala kecil. Kebijakan upah minimum di Pulau Jawa mengalami tren kenaikan yang stabil dari tahun ke tahun.

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan antar provinsi yang mencerminkan perbedaan tingkat perkembangan ekonomi, biaya hidup, serta

struktur industri di masing-masing wilayah. Provinsi dengan aktivitas ekonomi tinggi dan biaya hidup besar cenderung memiliki UMP lebih tinggi, sedangkan daerah dengan struktur ekonomi yang lebih sederhana memiliki UMP yang relatif lebih rendah. Dengan demikian, perbedaan ini mencerminkan kondisi ekonomi regional yang beragam sekaligus menunjukkan bahwa kebijakan UMP disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

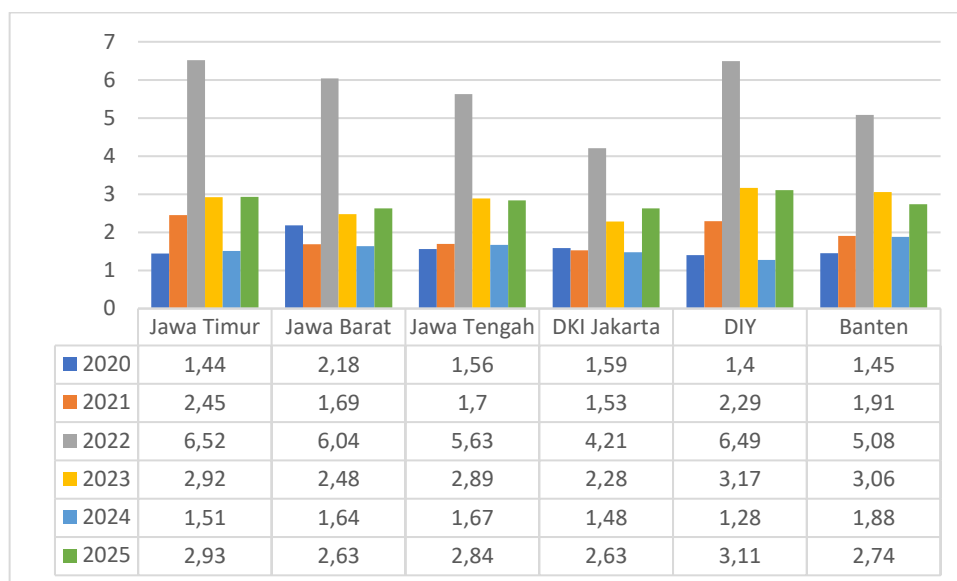
Perubahan tingkat inflasi memiliki implikasi terhadap dinamika permintaan dan penawaran barang maupun jasa. Ketika permintaan masyarakat mengalami peningkatan, perusahaan cenderung memperluas kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja, sehingga dapat menekan tingkat pengangguran terbuka. Sebaliknya, apabila permintaan masyarakat menurun, perusahaan akan mengurangi jumlah produksi yang berakibat pada penurunan kebutuhan tenaga kerja. Berkurangnya jumlah pekerja ini pada akhirnya dapat melemahkan daya beli masyarakat, yang selanjutnya kembali menurunkan permintaan terhadap barang dan jasa (Mudawamah et al. 2024). Disparitas ekonomi antarprovinsi ini menciptakan heterogenitas yang signifikan dalam respons variabel makroekonomi terhadap TPT usia 25–34 tahun.

Hubungan antara inflasi dan pengangguran secara tradisional dijelaskan melalui Kurva Phillips yang dikembangkan oleh *A.W. Phillips* pada tahun 1958. Kurva Phillips menggambarkan hubungan terbalik jangka pendek antara inflasi dan pengangguran: ketika inflasi meningkat, pengangguran cenderung turun, dan sebaliknya. Asumsi ini bekerja dalam kerangka *demand-pull inflation*, di mana peningkatan permintaan agregat mendorong ekspansi produksi dan penyerapan tenaga kerja. Namun, pada kasus *cost-push inflation* seperti yang terjadi di Indonesia periode 2020–2024, Kurva Phillips konvensional tidak berlaku. Inflasi

yang dipicu kenaikan biaya produksi justru menekan profitabilitas perusahaan dan mendorong efisiensi tenaga kerja, yang berpotensi meningkatkan pengangguran secara bersamaan dengan inflasi yang tinggi, sebuah kondisi yang dikenal sebagai stagflasi (Oktavia et al. 2024).

Gambar 1.6 Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK)

Di Pulau Jawa Tahun 2020-2025 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik (2020 – 2025)

Berdasarkan gambar 1.6 diatas 2020 hingga 2021, Laju inflasi di berbagai provinsi di Pulau Jawa cenderung berada pada tingkat yang rendah dan relatif stabil, yaitu berada pada kisaran 1% hingga 3%. Kondisi ini mencerminkan lemahnya daya beli masyarakat sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas ekonomi secara luas. Memasuki tahun 2022, terjadi lonjakan inflasi yang cukup signifikan di seluruh wilayah, dengan angka yang meningkat hingga mencapai kisaran 4% sampai 6%, bahkan di beberapa daerah seperti DI Yogyakarta dan Jawa Timur melampaui angka tersebut. Kenaikan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya harga energi, terganggunya rantai distribusi, serta tekanan inflasi dari kondisi global. Memasuki tahun 2023, inflasi

mulai menunjukkan tren penurunan dan kembali berada pada kisaran moderat, yaitu sekitar 2% hingga 3%, yang mengindikasikan mulai efektifnya kebijakan stabilisasi harga yang diterapkan pemerintah. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2024, di mana tingkat inflasi kembali melemah hingga berada di kisaran 1% sampai 2%, mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih terkendali meskipun pemulihan daya beli masyarakat belum sepenuhnya optimal. Pada tahun 2025, inflasi kembali mengalami sedikit peningkatan di seluruh provinsi, namun masih berada dalam batas yang relatif aman, yakni sekitar 2% hingga 3%.

Selain faktor-faktor makroekonomi yang telah disebutkan, kelompok usia 25–34 tahun juga menghadapi risiko *scarring effect* atau luka permanen akibat disrupsi pasar kerja yang terjadi pada tahun 2020. Teori *scarring effect* dalam ekonomi ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pengalaman pengangguran dalam jangka waktu tertentu dapat meninggalkan dampak negatif jangka panjang pada prospek karir seseorang, baik melalui depresiasi modal manusia, hilangnya jaringan profesional, maupun stigma dari calon pemberi kerja. Bagi angkatan kerja berusia 25–34 tahun yang kehilangan pekerjaan atau terhambat karirnya pada masa pandemi 2020, proses reintegrasi ke pasar kerja menjadi semakin sulit, terutama ketika pasar kerja pasca-pandemi bergerak cepat menuju ekonomi digital dan otomatisasi yang membutuhkan kompetensi baru yang berbeda (Daffa, et al 2025).

Penelitian yang telah dilakukan Sembiring & Sasongko (2019) menyimpulkan bahwa produk domestik regional bruto, inflasi dan upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran di Indonesia. Pada studi ini adalah cakupan analisisnya yang masih berfokus pada tingkat pengangguran secara umum tanpa memecah karakteristik angkatan kerja. Penelitian yang

dilakukan (Al. 2020) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan tingkat upah berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat pengangguran. Penelitian ini sudah menasar kelompok usia tertentu tetapi analisis penelitian ini masih sempit karena hanya dibatasi pada satu rentang usia saja (kelompok usia muda 15-24 tahun). Penelitian yang dilakukan oleh (Soeharjoto and Mitha Rachma Oktavia 2021) Menyimpulkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Meskipun demikian, secara parsial hanya inflasi yang terbukti memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan Upah Minimum Provinsi (UMP) menunjukkan arah yang tidak signifikan terhadap pengangguran. Penelitian yang dilakukan oleh (Sari and Handayani 2022) Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa durasi pencarian kerja sangat dipengaruhi oleh upah reservasi dan umur. Menunjukkan bahwa umur pelamar kerja sangat memengaruhi dan menjadi penentu utama dalam dinamika pasar tenaga kerja, dimana kelompok usia 25–34 tahun memiliki durasi pencarian kerja yang lebih singkat dibanding usia 15–24 tahun.

Penelitian yang dilakukan Wahab (2022) Penelitian ini Menyimpulkan bahwa upah dan pertumbuhan penduduk berdampak positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Tingginya dinamika pasar kerja ini membuktikan bahwa inflasi justru memberikan arah yang positif namun tidak signifikan secara statistik terhadap tingkat pengangguran terbuka. Penelitian yang dilakukan (Putri & Muljaningsih 2023) menyimpulkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Studi ini menegaskan bahwa hasil pengujian dampak makroekonomi terhadap pengangguran masih belum konsisten dan bervariasi di berbagai wilayah. Dari beberapa penelitian tersebut, penulis mengambil beberapa faktor yang perlu di uji, sehingga penelitian ini untuk

mengisi kesenjangan atau gap pada penelitian sebelumnya mengenai faktor yang mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, dan inflasi dikarenakan Penelitian terdahulu hanya cenderung berfokus pada tingkat pengangguran secara umum atau terpusat pada usia muda (15-24 tahun) dan gagal dalam memprediksi fenomena data di pasar tenaga kerja pada usia produktif matang, sehingga perlu dilakukan pengujian kembali dengan pendekatan dan wilayah penelitian yang berbeda.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kelompok usia 25–34 tahun sebagai objek analisis, yang berbeda dengan sebagian besar penelitian sebelumnya yang masih menggunakan tingkat pengangguran secara umum atau kelompok usia muda 15–24 tahun. Selain itu, penelitian ini menggunakan data panel enam provinsi di Pulau Jawa selama periode 2020–2025 yang mencakup fase pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Dinamika Tingkat Pengangguran Terbuka Usia 25–34 Tahun di Pulau Jawa: Studi Data Panel atas Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, dan Inflasi Tahun 2020 –2025”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) usia 25-34 tahun Di Pulau Jawa selama periode 2020-2025?
2. Apakah upah minimum provinsi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka usia 25-34 Di Pulau Jawa tahun 2020-2025?

3. Apakah Inflasi provinsi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka usia 25-34 Di Pulau Jawa tahun 2020-2025?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, dan inflasi berpengaruh secara simultan terhadap tingkat pengangguran terbuka usia 25–34 tahun di enam provinsi di Pulau Jawa periode 2020–2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu ekonomi ketenagakerjaan di Indonesia. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh variabel-variabel makroekonomi pilihan terhadap dinamika Tingkat Pengangguran Terbuka usia 25–34 tahun di 6 Provinsi Di Pulau Jawa. Secara khusus, tujuan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

- 1 Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) usia 25–34 tahun di Pulau Jawa periode 2020–2025.
- 2 Menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) usia 25–34 tahun di Pulau Jawa periode 2020–2025.
- 3 Menganalisis pengaruh inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) usia 25–34 tahun di Pulau Jawa periode 2020–2025.
- 4 Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan inflasi secara simultan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) usia 25–34 tahun Pulau Jawa periode 2020–2025.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas, baik dari dimensi keilmuan (teoritis) maupun dimensi terapan (praktis). Manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya bidang ekonomi ketenagakerjaan (*labor economics*) dan ekonomi makro regional, dengan menguji relevansi dan keterbatasan *teori Okun's Law*, *Teori Upah Minimum Neoklasik*, dan *Kurva Phillips* dalam konteks negara berkembang, khususnya Indonesia pada periode pasca-pandemi 2020–2025. Temuan empiris ini dapat memperkaya diskursus akademis mengenai kondisionalitas berlakunya teori-teori ekonomi klasik di negara berkembang.
2. Penelitian ini dapat dijadikan referensi akademis yang komprehensif bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang dinamika pasar tenaga kerja di Indonesia, terutama pada segmen usia produktif matang (25–34 tahun), dengan menggunakan pendekatan data panel provinsi yang memungkinkan pengendalian heterogenitas yang tidak teramati antar wilayah.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang kuat mengenai fenomena *jobless growth*, *scarring effect* pasca-pandemi, dan dampak *cost-push inflation* terhadap ketenagakerjaan di Indonesia, yang secara kolektif dapat memperkaya literatur ketenagakerjaan nasional dan internasional mengenai respon pasar kerja terhadap guncangan ekonomi berskala besar.

4. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi metodologis dalam penggunaan pendekatan analisis regresi data panel (*Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*) dalam studi ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk prosedur pemilihan model yang tepat melalui Uji *Chow*, *Hausman*, dan *Lagrange Multiplier*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Pusat (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas): Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan ilmiah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif dan berbasis bukti (*evidence-based policy*), terutama dalam merancang strategi pemulihan ekonomi yang inklusif dan mampu mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja usia 25–34 tahun. Temuan mengenai variabel yang paling dominan mempengaruhi TPT dapat menjadi panduan dalam menentukan prioritas kebijakan.
2. Bagi Pemerintah Daerah (Gubernur dan Dewan Pengupahan Provinsi): Penelitian ini dapat memberikan landasan empiris dalam pengambilan keputusan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang mempertimbangkan dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja usia produktif matang di wilayah masing-masing, sehingga kebijakan upah minimum dapat dirancang secara lebih proporsional dan berkeadilan.
3. Bagi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penelitian: Penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai indikator-indikator makroekonomi yang paling berpengaruh terhadap pengangguran usia produktif matang, sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam penyempurnaan sistem

statistik ketenagakerjaan dan perancangan indikator pemantauan yang lebih komprehensif.

4. Bagi Pelaku Usaha dan Asosiasi Industri: Temuan penelitian ini dapat membantu pelaku industri dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja usia matang, termasuk sensitivitas penyerapan tenaga kerja terhadap perubahan kondisi makroekonomi, sehingga perusahaan dapat menyusun strategi sumber daya manusia (SDM) yang lebih adaptif, antisipatif, dan berkelanjutan.
5. Bagi Akademisi, Dosen, dan Mahasiswa Ekonomi: Penelitian ini dapat dijadikan referensi akademis, bahan ajar, dan inspirasi untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan ekonomi ketenagakerjaan, ekonomi regional, dan analisis data panel di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan mendorong munculnya penelitian-penelitian turunan yang lebih spesifik pada subkelompok usia, sektor industri, atau wilayah tertentu.
6. Bagi Mahasiswa dan Perguruan Tinggi: Penelitian ini merupakan wujud nyata penerapan ilmu ekonomi yang dipelajari selama masa studi untuk memecahkan permasalahan aktual di masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada reputasi akademik institusi melalui luaran penelitian yang berkualitas dan relevan dengan isu ketenagakerjaan nasional.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu dikemukakan secara eksplisit agar pembaca dapat memahami ruang lingkup dan keterbatasan generalisasi hasil penelitian. Batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Batasan Subjek: Penelitian ini membatasi analisis hanya pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kelompok usia 25–34 tahun, sehingga temuan dan rekomendasi yang dihasilkan tidak dapat secara langsung digeneralisasi untuk kelompok usia lainnya, seperti usia muda (15–24 tahun) maupun usia paruh baya (35–54 tahun) yang mungkin memiliki dinamika dan determinan pengangguran yang berbeda.
2. Batasan Wilayah: Penelitian ini mencakup enam provinsi di Pulau Jawa, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur yang memiliki ketersediaan data lengkap selama periode 2020–2025. Pemilihan wilayah tersebut didasarkan pada kontribusinya yang dominan terhadap perekonomian nasional serta tingginya konsentrasi penduduk dan angkatan kerja di Pulau Jawa. Namun demikian, penelitian ini tidak mencakup analisis pada tingkat kabupaten/kota karena keterbatasan ketersediaan data berdasarkan kelompok umur secara konsisten.
3. Batasan Waktu: Penelitian ini menggunakan data periode 2020–2025 (6 tahun), yang dipilih karena mencakup fase guncangan pandemi COVID-19 hingga fase pemulihan ekonomi. Temuan penelitian ini belum tentu representatif untuk periode sebelum pandemi atau periode di luar rentang waktu yang diteliti.
4. Batasan Variabel: Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen makroekonomi, yaitu Pertumbuhan Ekonomi, UMP, dan Inflasi. Disadari bahwa terdapat variabel-variabel lain yang juga dapat memengaruhi TPT usia 25–34 tahun, seperti tingkat pendidikan, partisipasi angkatan kerja, struktur industri, investasi langsung asing (FDI), dan

digitalisasi ekonomi. Namun, pembatasan ini dilakukan untuk menjaga fokus analisis dan menghindari masalah multikolinearitas.

5. Batasan Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel. Metode ini memiliki kelebihan dalam mengontrol efek individu yang tidak teramati, namun memiliki keterbatasan dalam menjelaskan mekanisme kausal yang lebih mendalam, yang idealnya memerlukan pendekatan kualitatif atau metode instrumental variable (IV) untuk mengatasi potensi masalah endogenitas.